

INTISARI

Muhammad Subhan: *Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Telaah terhadap Akad Setoran dan Penggunaan Dana Haji)*, di bawah bimbingan (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dan (II) Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata kunci: Akad, Dana Haji, Infrastruktur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad setoran dana haji yang selama ini dan mengetahui penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji). Dengan fokus penelitian ada pada akad dana haji dan penggunaan dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang undangan tentang akad setoran haji dan penggunaan dana haji ditinjau hukum syariah, UUD RI 1945 dan hukum Negara RI. Bahan hukum dikumpulkan dengan sistem dokumentasi. Pengumpulam data yang digunakan berupa kajian pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Akad wakalah yang ada antara calon jamaah haji dan BPKH selaku pengelola keuangan haji harus memenuhi syarat berakad yaitu harus ada ijab dan kabul. Para ulama Hanafi mensyaratkan adanya ijab dan kabul dalam setiap akad sedangkan para ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hanbali disamping mensyaratkan adanya ijab dan qabul dalam setiap akad juga mensyarkan bahwa yang pihak berakad baik *muwakkil* pihak pemberi kuasa maupun *wakiil* pihak penerima kuasa harus sekurang-kurangnya mumayyiz dan berakal, serta objek akad harus benda atau sesuatu yang halal menurut syara. Kedua, dengan adanya akad wakalah yang sesuai dengan syara', dana haji yang ada bisa dimaafatkan oleh BPKH sebagai wakil jamaah haji untuk mengelola dana yang telah dititipkan dan diamanahkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih memungkinkan. Dengan syarat bahwa investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji dan pengelolaanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. .

ABSTRACT

Muhammad Subhan: Use of Hajj Funds for Infrastructure Development (Review of Deposit Agreements and Use of Hajj Funds), under the guidance of (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I and (II) Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. Thesis on Islamic Economics Law Study Program, Faculty of Law, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Keywords: Contract, Hajj Fund, Infrastructure

This study aims to determine the use of the pilgrimage fund deposit contract that has been done and to know the use of the pilgrimage fund for infrastructure development that should (study of the deposit contract and the use of pilgrimage funds). With the focus of research on the pilgrimage fund and the use of hajj funds in view of Islamic economic law that will be used to finance infrastructure development.

This research is a qualitative research. This type of research is normative legal research. The approach in this research is analytical descriptive, revealing the statutory regulations regarding the hajj pilgrimage contract and the use of hajj funds in terms of sharia law, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the laws of the Republic of Indonesia. Legal materials are collected using a documentation system. Data collection used in the form of library research and study documents.

The results of the study show: First, the contractual time that exists between prospective pilgrims and BPKH as the Hajj financial manager must meet the requirements of the contract, that is, there must be consent or offer (ijab) and an acceptance (kabal). The Hanafi scholars require the consent and Kabul in each contract while the scholars from Maliki, Syafi'i and Hanbali in addition to requiring consent/offer and acceptance in each contract also requires that the parties in contract (muwakkil) the party giving the power of attorney and (wākil) representatives of the recipient must at least less mumayyiz and ingenious, and the object or the goods of the contract must be something that is lawful according to syara. Secondly, with a wakalah agreement in accordance with syara ', the existing hajj funds can be used by BPKH as the hajj pilgrims representatives to manage the funds that have been deposited and entrusted. The Indonesian Ulama Council (MUI) fatwa on the management of hajj funds for productive sector investment needs such as infrastructure development is still possible. With the condition that the investment has a low level of risk, has a value for the benefit of the pilgrims and their management is based on sharia principles. .